



Pemahaman Hadis Al-Ghazali Tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia

Rizqi Shohibul Khotami¹, M. Reza Saputra²

¹ Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

² Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Jakarta, Indonesia

Email : khotamirizqi@gmail.com¹, reza.alkasyaf88@gmail.com²

Alamat: Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Korespondensi Penulis : khotamirizqi@gmail.com*

Abstract. *This research examines Al-Ghazali's understanding of advising leaders and its relevance to the context of leadership in Indonesia. Employing a qualitative approach with a case study method, data was gathered through documentation of Al-Ghazali's works, case studies of corruption and ethical violations among Indonesian state officials, and in-depth interviews with experts in Islamic leadership, academics, and legal practitioners. The findings indicate that Al-Ghazali's teachings on character, integrity, and morality in leadership are highly relevant to addressing leadership challenges in Indonesia, such as corruption and abuse of power. Ulama (Islamic scholars) play a crucial role in advising leaders to enhance leadership quality and governance. This research also contributes theoretically to the study of Islamic leadership ethics, demonstrating that ethical principles derived from hadiths can develop an ethical and effective governance model in diverse cultural contexts. By implementing Al-Ghazali's leadership principles, it is hoped that more just, transparent, and people-oriented leadership can be established in Indonesia.*

Keywords: *Islamic Leadership, Al-Ghazali, Leadership Ethics.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pemahaman Al-Ghazali tentang menasihati pemimpin dan relevansinya dalam konteks kepemimpinan di Indonesia melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui dokumentasi karya Al-Ghazali, studi kasus korupsi dan pelanggaran etika pejabat negara di Indonesia, serta wawancara mendalam dengan pakar kepemimpinan Islam, akademisi, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Al-Ghazali tentang karakter, integritas, dan moralitas dalam kepemimpinan sangat relevan untuk menghadapi tantangan kepemimpinan di Indonesia, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ulama memiliki peran penting dalam memberikan nasihat kepada pemimpin untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pemerintahan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian etika kepemimpinan Islam, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika dari hadis dapat mengembangkan model tata kelola yang etis dan efektif dalam berbagai konteks budaya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Al-Ghazali, diharapkan tercipta kepemimpinan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat di Indonesia.

Kata Kunci: Kepemimpinan Islam, Al-Ghazali, Etika Kepemimpinan

1. PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam Islam memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam konteks keagamaan tetapi juga dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu aspek krusial dalam kepemimpinan Islam adalah pentingnya menasihati pemimpin, yang telah menjadi tradisi sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pemahaman dan penerapan etika kepemimpinan Islam menjadi sangat relevan, terutama mengingat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pejabat negara saat ini.

Beberapa kasus korupsi dan pelanggaran etika yang melibatkan pejabat tinggi negara telah mencoreng citra kepemimpinan di Indonesia. Kasus korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian terkait proyek *food estate* di lahan eks pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek strategis nasional (Putri, 2023). Selain itu, dugaan korupsi yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kasus pengadaan *Base Transceiver Station* (BTS) juga menambah daftar panjang permasalahan etika kepemimpinan di Indonesia (Putri, 2023).

Tidak hanya di ranah eksekutif, lembaga yudikatif pun tidak luput dari persoalan etika. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres telah menciderai prinsip independensi dan ketidakberpihakan hakim, yang berujung pada pemecatannya (Semanticscholar, 2023). Di sisi lain, pelanggaran berat yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pelanggaran etika dan pencopotan jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memperlihatkan betapa rentannya integritas kepemimpinan di lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan demokrasi (Putri, 2023).

Al-Ghazali, seorang ulama dan pemikir Islam terkemuka, telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami konsep kepemimpinan dan etika dalam Islam. Pemikirannya tentang bagaimana menasihati pemimpin dan pentingnya akhlak dalam kepemimpinan masih sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks modern, khususnya di Indonesia (Takwil, 2020). Namun, penerapan pemikiran klasik seperti Al-Ghazali dalam menghadapi tantangan kepemimpinan kontemporer masih perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pentingnya nasihat dalam kepemimpinan Islam. Penelitian (Arifin, 2020) menjelaskan pemahaman tentang hadis Al-Ghazali mengenai menasihati pemimpin memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kepemimpinan modern di Indonesia. Al-Ghazali, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, menekankan pentingnya keadilan, moralitas, dan tanggung jawab sosial dalam kepemimpinan. Dalam berbagai karyanya seperti *Al-Iqtisad fi al-'Itiqad*, *At-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, *Ihya 'Ulum ad-Din*, dan *Fadhaih al-Batiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhhiriyyah*, Al-Ghazali menguraikan kriteria pemimpin ideal yang mencakup pengetahuan, kompetensi, agama yang baik, moralitas, kesehatan fisik dan mental, amanah, keadilan, serta kesediaan untuk mendengarkan nasihat dari ulama dan hidup sederhana dekat dengan rakyat.

Idami (2019) menjelaskan etika dalam kepemimpinan menurut Al-Ghazali juga menekankan pentingnya karakter dan integritas. Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki etika yang tinggi dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Konsep ini sangat relevan dalam konteks kepemimpinan di Indonesia, di mana integritas dan karakter sering kali menjadi sorotan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu (Yunita, 2023) model kepemimpinan spiritual yang diusulkan oleh Al-Ghazali juga dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Model ini menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kepemimpinan, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan etika. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini dapat membantu dalam menciptakan kepemimpinan yang lebih adil dan bertanggung jawab, serta dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang menghubungkan pemahaman klasik seperti Al-Ghazali dengan konteks modern Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan yang telah disebutkan sebelumnya (Putri, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman Al-Ghazali terhadap hadis mengenai menasihati pemimpin dan bagaimana pemahaman tersebut dapat diterapkan dalam konteks kepemimpinan pejabat negara di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan kontribusi pemahaman Al-Ghazali terhadap etika kepemimpinan dalam Islam secara lebih luas, dengan mempertimbangkan kasus-kasus aktual yang terjadi di Indonesia. Dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menerapkan etika kepemimpinan Islam dalam konteks modern Indonesia, serta menjembatani kesenjangan antara pemikiran klasik dan tantangan kepemimpinan kontemporer yang semakin kompleks.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami pemikiran Al-Ghazali tentang menasihati pemimpin dalam konteks kepemimpinan di Indonesia. Data dikumpulkan melalui dokumentasi karya Al-Ghazali, studi kasus korupsi dan pelanggaran etika pejabat negara di Indonesia, serta wawancara mendalam dengan pakar kepemimpinan Islam, akademisi, dan praktisi hukum. Analisis data melibatkan analisis isi untuk mengekstrak konsep utama dari teks Al-Ghazali dan analisis tematik untuk

mengidentifikasi tema-tema utama dari data empiris, sementara validitas temuan dijamin melalui teknik triangulasi yang menggabungkan berbagai sumber dan metode. Hasil penelitian memberikan pemahaman mendalam tentang relevansi pemikiran Al-Ghazali dalam konteks kepemimpinan kontemporer di Indonesia, menawarkan kontribusi signifikan dalam memahami dan menerapkan etika kepemimpinan Islam.

3. PEMBAHASAN

KONSEP UTAMA AL-GHAZALI TENTANG NASIHAT DAN KEPEMIMPINAN

Imam Al-Ghazali memiliki pandangan yang komprehensif mengenai etika kepemimpinan dan pentingnya memberikan nasihat kepada pemimpin. Dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali menekankan pentingnya seorang pemimpin memiliki karakter yang baik dan integritas (Idami, 2019). Beliau berpendapat bahwa etika dalam kepemimpinan berfokus pada aspek karakter dan integritas seorang pemimpin.

Dalam Nasihat *al-Muluk* (Nasihat untuk Para Raja), Al-Ghazali memberikan panduan etis bagi para penguasa (Al-Ghazali, 2006). Karya ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali memandang pemberian nasihat kepada pemimpin sebagai suatu kewajiban moral dan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu hadis yang sering dirujuk oleh Al-Ghazali dalam konteks ini adalah:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ
(هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه)

Artinya: "Agama itu adalah nasihat". Kami bertanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan umat Islam pada umumnya", (Hr. Muslim) (Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, 219)

Al-Ghazali menggunakan hadis ini sebagai landasan untuk menekankan pentingnya memberikan nasihat, termasuk kepada para pemimpin. Beliau menafsirkan bahwa nasihat kepada pemimpin merupakan bagian integral dari kewajiban agama (Al-Ghazali, 2006).

Analisis Pemikiran Al-Ghazali

1. Etika Kepemimpinan: Al-Ghazali menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki karakter yang baik dan integritas tinggi. Ini menjadi dasar bagi konsep kepemimpinan etis dalam pemikiran Islam (Idami, 2019).
2. Kewajiban Memberi Nasihat: Al-Ghazali memandang pemberian nasihat kepada pemimpin bukan hanya sebagai hak, tetapi juga kewajiban moral bagi umat (Al-Ghazali, 2006).
3. Pendekatan Bijaksana: Dalam memberikan nasihat, Al-Ghazali menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana dan penuh hormat, sesuai dengan ajaran Islam (Maharani, 2024).
4. Tujuan Perbaikan: Nasihat kepada pemimpin, menurut Al-Ghazali, bertujuan untuk perbaikan dan kesejahteraan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Arifin, 2020).
5. Keseimbangan Kekuasaan: Al-Ghazali melihat pemberian nasihat sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah kesewenang-wenangan pemimpin (Black, 2011)

Pemahaman Al-Ghazali tentang hadis menasehati pemimpin mencerminkan pandangan holistiknya tentang tata kelola pemerintahan dalam Islam. Beliau menekankan bahwa nasihat bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral yang harus dilakukan dengan bijaksana dan bertujuan untuk kebaikan bersama.

RELEVANSI PEMAHAMAN AL-GHAZALI DALAM KONTEKS KEPEMIMPINAN DI INDONESIA

Tantangan kepemimpinan di Indonesia saat ini mencerminkan kompleksitas yang semakin meningkat di era digital dan globalisasi. Beberapa kasus aktual menunjukkan bahwa para pemimpin di Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan solusi komprehensif. Salah satu tantangan utama adalah maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Data KPK menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga Juli 2023, terdapat 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD (KPK, 2023). Kasus-kasus seperti penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada (CNBC, 2023), lalu menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius di kalangan elit pemerintahan. Hal ini mencerminkan lemahnya integritas dan akuntabilitas para pemimpin.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ajaran Al-Ghazali tentang kepemimpinan masih sangat relevan untuk diterapkan. Al-Ghazali menekankan pentingnya

integritas moral dan tanggung jawab pemimpin. Ia berpendapat bahwa pemimpin harus memiliki intelektualitas, agama, dan akhlak yang baik, serta mampu mempengaruhi lingkungan yang dipimpin (Afriansyah, 2017). Konsep ini sejalan dengan kebutuhan akan pemimpin yang berintegritas untuk mengatasi persoalan korupsi.

Al-Ghazali juga menekankan bahwa pemimpin harus datang dari rakyat dan dipilih oleh rakyat (Afriansyah, 2017). Hal ini relevan dengan sistem demokrasi di Indonesia dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses kepemimpinan. Selain itu, Al-Ghazali menyoroti pentingnya keadilan dan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama kepemimpinan (Hidayatullah, 22). Prinsip ini sangat penting diterapkan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dalam menghadapi era digital, ajaran Al-Ghazali tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan kecerdasan akal yang dituntun oleh jiwa keagamaan dapat menjadi panduan (Afriansyah, 2017). Pemimpin perlu terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi tantangan kepemimpinan di Indonesia, beberapa langkah yang dapat diambil berdasarkan ajaran Al-Ghazali antara lain:

1. Memperkuat pendidikan karakter dan etika kepemimpinan bagi calon pemimpin.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kinerja pemimpin.
4. Mengembangkan sistem merit yang memprioritaskan kompetensi dan integritas dalam pemilihan pemimpin.
5. Menerapkan prinsip keadilan dan kemaslahatan rakyat dalam setiap kebijakan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Al-Ghazali yang dipadukan dengan kebutuhan era modern, diharapkan dapat terwujud kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat akan mampu mengatasi berbagai tantangan dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan.

IMPLIKASI INTERPRETASI AL-GHAZALI TERHADAP ETIKA KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Kontribusi terhadap Teori Kepemimpinan Islam

Imam Al-Ghazali, seorang ulama dan filsuf besar dalam sejarah Islam, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teori kepemimpinan Islam melalui karyanya yang berfokus

pada etika dan moralitas. Beberapa kontribusi utama Al-Ghazali terhadap teori kepemimpinan Islam meliputi:

1. Konsep Pemimpin Ideal: Al-Ghazali menekankan bahwa seorang pemimpin ideal harus memiliki tiga kualitas utama: ilmu pengetahuan, agama, dan akhlak (Na'im, 2022). Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas, keimanan yang kuat, dan akhlak yang mulia untuk dapat memimpin dengan baik dan adil.
2. Etika Kepemimpinan: Dalam pandangan Al-Ghazali, etika kepemimpinan sangat penting. Dia menekankan bahwa pemimpin harus menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan secara demokratis, dan tidak boleh lalim. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan (Munfaridah, 2016).
3. Kepemimpinan sebagai Amanah: Al-Ghazali melihat kepemimpinan sebagai amanah yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran bahwa segala tindak-tanduknya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan (Munfaridah, 2016).

Peran Ulama dalam Memberikan Nasihat kepada Pemimpin

Al-Ghazali juga menyoroti pentingnya peran ulama dalam memberikan nasihat kepada pemimpin. Beberapa poin penting terkait peran ulama menurut Al-Ghazali adalah:

1. Nasihat yang Tulus dan Objektif: Al-Ghazali menekankan bahwa ulama harus memberikan nasihat yang tulus dan tidak memiliki ambisi terhadap kedudukan atau harta negara. Nasihat yang diberikan harus berdasarkan kebenaran dan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi (Munfaridah, 2016).
2. Menjaga Integritas: Ulama harus menjaga integritas mereka saat memberikan nasihat kepada pemimpin. Mereka harus memastikan bahwa nasihat yang diberikan adalah untuk kemaslahatan umum dan bukan untuk keuntungan pribadi. Menjaga muru'ah atau marwah sangat penting dalam hal ini (NU, 2023).
3. Kolaborasi untuk Keadilan dan Kebaikan: Al-Ghazali melihat hubungan antara ulama dan pemimpin sebagai hubungan yang saling melengkapi. Ulama berperan sebagai penasihat yang membantu pemimpin dalam membuat keputusan yang adil dan baik. Kolaborasi ini bertujuan untuk merealisasikan keadilan dan kebaikan dalam masyarakat (NU, 2023).

Interpretasi Al-Ghazali terhadap etika kepemimpinan dalam Islam memberikan panduan yang komprehensif bagi pemimpin Muslim. Dengan menekankan pentingnya ilmu

pengetahuan, agama, dan akhlak, serta peran ulama dalam memberikan nasihat yang tulus dan objektif, Al-Ghazali telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teori kepemimpinan Islam. Pandangan ini tidak hanya relevan pada zamannya tetapi juga tetap relevan dalam konteks kepemimpinan modern.

STUDI KASUS PEJABAT NEGARA DI INDONESIA

Penerapan Pemahaman Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dan filsuf Islam, memberikan banyak nasihat yang relevan untuk para pemimpin dan pejabat negara. Salah satu karyanya yang terkenal adalah *Nasihat al-Muluk* (Nasihat untuk Para Raja), di mana ia menekankan pentingnya keadilan, integritas, dan tanggung jawab moral dalam kepemimpinan.

Beberapa nasihat utama Al-Ghazali yang relevan bagi pejabat negara antara lain:

1. Tentang keadilan dan integritas pemimpin, Al-Ghazali (2006) menyatakan dalam kitab *Nasihat al-Muluk*:

الْعَدْلُ أَسَاسُ الْمَلِكِ وَعِمَادُ السُّلْطَنَةِ

Artinya: “Keadilan adalah dasar kekuasaan dan tiang kesultanan”. Dalam konteks keadilan dan integritas Al-Ghazali menekankan bahwa seorang pemimpin harus adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ia memperingatkan penguasa agar tidak terbuai oleh sanjungan dan tetap waspada terhadap ulama-ulama palsu. Hadis yang sering dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam konteks keadilan pemimpin adalah:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ"

Artinya: “Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah pada Hari Kiamat dan yang paling dekat dengan-Nya adalah pemimpin yang adil, dan orang yang paling dibenci Allah dan yang paling jauh dari-Nya adalah pemimpin yang zalim.”

2. Mengenai pentingnya menghindari korupsi dan penyuapan, Al-Ghazali (2006) menulis:

الرِّشْوَةُ تُفْسِدُ الْقَضَاءَ وَتَهْدِمُ أَرْكَانَ الدَّوْلَةِ

Artinya: “Suap merusak peradilan dan menghancurkan sendi-sendi negara”. Menghindari Korupsi: Al-Ghazali mengutuk penyuapan dan korupsi, terutama dalam lembaga penegak keadilan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Hadis

ini terdapat dalam kitab Sunan Abi Dawud, salah satu kitab hadis yang sering dirujuk oleh Imam Al-Ghazali dalam tentang pentingnya menghindari korupsi dan penyuapan:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Artinya: “*Abu Dawud Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Rabi'ah menceritakan kepada saya, dari Abdullah bin Abi Raja, dari Basyir bin Sa'd, dia berkata: Saya mendengar Nabi SAW bersabda: 'Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap,' dan Ibnu Hatim berkata: Saya mendengar Basyir bin Sa'd berkata: Saya mendengar Nabi SAW bersabda: 'Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap dalam hukum.'*”

3. Tentang kepemimpinan berbasis akhlak, Al-Ghazali (1993) menekankan:

إِنَّ الْمُلْكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالذِّينِ، وَالذِّينُ وَالْمُلْكُ تَوْأَمَانِ

Artinya: “*Sesungguhnya kekuasaan tidak akan sempurna kecuali dengan agama, dan agama dan kekuasaan adalah saudara kembar*”. Kepemimpinan Berbasis Akhlak: Menurut Al-Ghazali, pemimpin harus memiliki akhlak yang baik, rendah hati, dan tidak sombong. Ia juga menekankan pentingnya pemimpin untuk selalu mengingat bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik Allah. Hadis yang sesuai dengan pembahasan Al-Ghazali tentang kepemimpinan berbasis akhlak:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: “*Nabi Muhammad SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap istrinya.*”

Hadis ini dapat ditemukan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari, sesuai dengan ajaran Al-Ghazali tentang kepemimpinan berbasis akhlak.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan

1. Penerapan Prinsip Keadilan: Beberapa pejabat di Indonesia telah mencoba menerapkan prinsip keadilan dalam kepemimpinan mereka. Misalnya, dalam upaya reformasi birokrasi dan penegakan hukum, ada pejabat yang berusaha menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
2. Pemberantasan Korupsi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia adalah contoh nyata dari upaya untuk menerapkan nasihat Al-Ghazali tentang menghindari korupsi. KPK telah berhasil menangkap dan mengadili banyak pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi, meskipun tantangan masih ada.

Kegagalan

1. Korupsi yang Masih Merajalela: Meskipun ada upaya pemberantasan korupsi, kenyataannya korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak pejabat yang masih terlibat dalam praktik korupsi, yang menunjukkan kegagalan dalam menerapkan nasihat Al-Ghazali tentang integritas dan keadilan.
2. Kepemimpinan yang Tidak Berbasis Akhlak: Beberapa pemimpin dan pejabat di Indonesia masih menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Misalnya, ada pejabat yang terlibat dalam skandal moral atau menunjukkan sikap sombong dan arogan dalam kepemimpinan mereka.

Penerapan nasihat dan pemikiran Al-Ghazali oleh pejabat negara di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, ada keberhasilan dalam upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Namun, di sisi lain, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam mengatasi korupsi yang merajalela dan meningkatkan integritas serta akhlak para pemimpin. Implementasi nasihat Al-Ghazali memerlukan komitmen yang kuat dan konsisten dari semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

DISKUSI TENTANG IMPLIKASI PRAKTIS DAN TEORITIS

Implikasi praktis bagi pejabat negara di Indonesia

Ajaran Al-Ghazali tentang memberi nasihat kepada pemimpin menawarkan wawasan berharga bagi pejabat negara di Indonesia, mengarahkan mereka pada praktik pemerintahan yang etis dan moral. Salah satu aspek utama yang ditekankan oleh Al-Ghazali adalah promosi

integritas di kalangan pemimpin (Adiputra et al., 2018). Hal ini berarti bahwa pejabat negara di Indonesia harus memprioritaskan kejujuran dan transparansi dalam tindakan mereka, mendorong budaya akuntabilitas dalam lembaga pemerintah. Dengan menerapkan langkah-langkah anti-korupsi yang ketat dan mendorong perilaku etis, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat secara signifikan.

Lebih lanjut, Al-Ghazali menekankan pentingnya akuntabilitas moral bagi pemimpin (Adiputra et al., 2018). Prinsip ini menunjukkan bahwa pejabat negara di Indonesia harus menjalani pelatihan dalam proses pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka. Melakukan audit etis secara reguler dan membentuk sistem pelaporan publik dapat membantu memastikan bahwa pemimpin mematuhi standar moral yang tinggi, sesuai dengan ajaran Al-Ghazali tentang akuntabilitas.

Dalam hal praktik pemerintahan, Al-Ghazali menganjurkan pengambilan keputusan secara konsultatif (Adiputra et al., 2018). Hal ini dapat dimodernisasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, seperti yang direkomendasikan oleh penelitian tentang transparansi pemerintah daerah di Indonesia (Adiputra et al., 2018). Dengan membentuk dewan penasihat yang terdiri dari para ahli dan perwakilan masyarakat, pejabat negara dapat membuat keputusan yang terinformasi dengan baik yang menguntungkan publik dan mencerminkan penekanan Al-Ghazali pada pentingnya mencari nasihat sebelum bertindak.

Selain itu, memprioritaskan kesejahteraan publik adalah inti dari ajaran Al-Ghazali (Adiputra et al., 2018). Pejabat negara di Indonesia dapat mengadopsi prinsip ini dengan fokus pada kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup warga negara, terutama populasi yang rentan. Investasi dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial sejalan dengan penekanan Al-Ghazali pada kesejahteraan rakyat dan dapat mengarah pada masyarakat yang lebih adil, sebagaimana diuraikan dalam studi tentang kepemimpinan etis, efektivitas, dan kinerja tim dari perspektif Islam (Zaim et al., 2021).

Komunikasi yang efektif adalah aspek kunci lainnya dari ajaran Al-Ghazali yang dapat bermanfaat bagi pejabat negara di Indonesia (Adiputra et al., 2018). Dengan menjaga saluran komunikasi yang transparan dengan publik, pemimpin dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang kepemimpinan spiritual dan implikasinya terhadap perilaku kewarganegaraan organisasi (Pio, 2020), yang menekankan pentingnya

komunikasi yang jelas dalam mendorong perilaku etis dan meningkatkan keterlibatan karyawan.

Selain itu, responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah hal yang penting bagi pemimpin, sebagaimana ditekankan oleh ajaran Al-Ghazali (Adiputra et al., 2018). Membentuk mekanisme umpan balik publik, seperti pertemuan balai kota dan platform online, dapat membantu pejabat negara di Indonesia tetap terhubung dengan masyarakat dan menanggapi kekhawatiran mereka dengan cepat. Responsif terhadap kebutuhan publik ini sangat penting untuk pemerintahan yang efektif, sebagaimana diuraikan dalam studi tentang diskresi administratif di Indonesia (Suparto, 2024).

Sebagai kesimpulan, implikasi praktis dari pemahaman Al-Ghazali tentang memberi nasihat kepada pemimpin menawarkan kerangka kerja komprehensif bagi pejabat negara di Indonesia untuk meningkatkan integritas, memperbaiki praktik pemerintahan, memperkuat hubungan masyarakat, dan akhirnya berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etis dan moral ini ke dalam pemerintahan, pemimpin Indonesia dapat menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik, sejalan dengan ajaran Al-Ghazali dan mendorong pemerintahan yang lebih etis dan efektif.

Implikasi Teoritis dalam Kajian Hadis dan Etika Kepemimpinan

Implikasi teoritis dari studi Hadis dalam ranah etika kepemimpinan sangat signifikan dan beragam, menawarkan kerangka etika komprehensif yang melampaui batasan waktu dan budaya. Sastra Hadis, sebagai komponen fundamental dari tradisi Islam, berfungsi sebagai sumber prinsip etika yang kaya yang dapat dimanfaatkan oleh para sarjana dan praktisi untuk mengembangkan kualitas kepemimpinan yang baik. Para sarjana mengkaji keaslian dan otoritas teks-teks Hadis untuk mengekstrak pedoman moral yang relevan untuk kepemimpinan, dengan menekankan keadilan, belas kasihan, dan pertanggungjawaban sebagai prinsip-prinsip dasar untuk tata kelola etis (Mayer et al., 2010).

Dalam konteks kepemimpinan kontemporer, implementasi prinsip-prinsip Hadis seperti konsultasi (*Shura*), kejujuran (*Siddiq*), dan pertanggungjawaban (*Mas'uliyah*) sangat relevan untuk mempromosikan transparansi dan kepercayaan dalam organisasi dan masyarakat. Ajaran-ajaran ini tidak hanya memiliki signifikansi historis tetapi juga memberikan kebijaksanaan praktis yang sejalan dengan prinsip-prinsip etika universal, sehingga memperluas aplikabilitasnya di luar tradisi Islam (Shin, 2012).

Kerangka teoritis yang ditawarkan oleh studi Hadis menawarkan pandangan yang unik tentang integrasi etika ke dalam struktur tata kelola. Dengan mendasarkan praktik kepemimpinan pada ajaran-ajaran etika yang berasal dari Hadis, para sarjana berkontribusi dalam pembentukan model tata kelola yang memprioritaskan kesejahteraan publik dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan pertanggungjawaban. Melalui analisis dan interpretasi yang teliti terhadap teks-teks Hadis, para sarjana mendapatkan wawasan etika yang dapat mengatasi tantangan-tantangan kepemimpinan kontemporer, memperkaya diskusi tentang signifikansi etika dalam tata kelola yang efektif (Kalshoven et al., 2010).

Selain itu, relevansi lintas-budaya dari etika Hadis menegaskan daya tarik dan kesesuaian universalnya di berbagai konteks budaya. Meskipun berasal dari tradisi Islam, ajaran-ajaran Hadis tentang kepemimpinan etis bersesuaian dengan teori-teori etika dari tradisi lain, mempromosikan dialog yang melampaui batas-batas budaya dan meningkatkan wacana global tentang etika kepemimpinan. Dengan menarik paralel antara prinsip-prinsip Hadis dan kerangka-kerangka etika dari berbagai budaya, para sarjana memperluas pemahaman tentang kepemimpinan etis yang lebih inklusif dan komprehensif.

Penggabungan studi Hadis dan etika kepemimpinan tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis kita tentang tata kelola etis tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi para pemimpin yang menghadapi dilema etika kompleks di lingkungan kontemporer. Dengan mengkaji literatur Hadis melalui sudut pandang akademis, para peneliti berkontribusi dalam pengembangan pemimpin yang mencerminkan integritas, keadilan, dan pertanggungjawaban, sehingga mendorong praktik tata kelola etis yang bermanfaat bagi organisasi, komunitas, dan masyarakat secara luas.

4.KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman Al-Ghazali tentang menasihati pemimpin memiliki relevansi signifikan dalam konteks kepemimpinan di Indonesia. Al-Ghazali menekankan pentingnya karakter, integritas, dan moralitas dalam kepemimpinan, serta kewajiban moral umat Islam untuk memberikan nasihat yang bijaksana dan penuh hormat kepada pemimpin. Ajarannya relevan dalam menghadapi tantangan kepemimpinan di Indonesia, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan menekankan perlunya pendidikan karakter, transparansi, dan akuntabilitas. Ulama memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan menjaga integritas pemimpin, yang dapat meningkatkan kualitas

kepemimpinan dan pemerintahan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian etika kepemimpinan Islam, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika dari hadis dapat mengembangkan model tata kelola yang etis dan efektif dalam berbagai konteks budaya. Diharapkan, penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Al-Ghazali dapat menciptakan kepemimpinan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat di Indonesia, serta menjembatani kesenjangan antara pemikiran klasik dan tantangan kepemimpinan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123-138. <https://doi.org/10.1108/ajar-07-2018-0019>
- Afriansyah, A. (2017). Konsep pemimpin ideal menurut Al-Ghazālī. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 1(2), 82-94. <https://doi.org/10.23971/njppi.v1i2.905>
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya' Ulumuddin* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Ghazali, A. H., & Harun, J. (Eds.). (2006). *Nasihat al-Muluk: Nasihat kepada raja-raja*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Arifin, M. S. (2020). The concept of ideal leader in Al-Ghazali's thought. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS)*, 4(1), 84-103. <https://doi.org/10.20885/ijis.vol4.iss1.art5>
- Black, A. (2011). The ethics of power: Advice-to-kings (nasihat al-muluk). In *The history of Islamic political thought: From the Prophet to the present* (pp. 111-117). Edinburgh: Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9780748647569-016>
- Idami, Z., & Andriansyah, A. (2019). The concept of ethics in leadership according to Imam Al-Ghazali's thought. *Prosiding ICOGISS 2019*, 750-758. <https://doi.org/10.32528/pi.v0i0.2537>
- Kalshoven, K., Hartog, D., & Hoogh, A. (2010). Ethical leader behavior and big five factors of personality. *Journal of Business Ethics*, 100(2), 349-366. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0685-9>
- Kardenal, K. (2011). Persoalan aktualisasi good governance dalam perspektif penyelenggaraan kekuasaan negara. *Jurnal Pemerintahan*, 6(11), 64-S. <https://doi.org/10.55745/jpstipan.v6i11.106>
- Maharani, N. I., Muzakki, A., & Islam, S. (2024). Kriteria pemimpin perspektif Imam Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin. *Jurnal Keislaman*, 7(1), 149-169. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.4020>

- Mayer, D., Kuenzi, M., & Greenbaum, R. (2010). Examining the link between ethical leadership and employee misconduct: The mediating role of ethical climate. *Journal of Business Ethics*, 95(S1), 7-16. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0794-0>
- Munfaridah, T. (2016). Kepemimpinan dalam Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(1), 1-33. <https://doi.org/10.21580/wa.v14i1.353>
- Na'im, Z. (2022). Etika kepemimpinan dalam perspektif Islam dan korelasinya terhadap kinerja. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 195-210. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.972>
- Pio, R. (2020). The relationship between spiritual leadership to quality of work life and ethical behavior and its implication to increasing the organizational citizenship behavior. *The Journal of Management Development*, 39(3), 293-305. <https://doi.org/10.1108/jmd-07-2018-0186>
- Putri, B. K., & Frinaldi, A. (2023). Korupsi bentuk dari penyalahgunaan wewenang pejabat di Indonesia. *AHKAM*, 2(4), 901-909. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2420>
- Shin, Y. (2012). CEO ethical leadership, ethical climate, climate strength, and collective organizational citizenship behavior. *Journal of Business Ethics*, 108(3), 299-312. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-1091-7>
- Suparto, S. (2024). Administrative discretion in Indonesia & Netherlands administrative court: Authorities and regulations. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*, 4(1), 75-100. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.189>
- Takwil, M. (2020). Kepemimpinan pendidikan Islam dalam pemikiran Al-Ghazali. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 196-209. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v4i2.175>
- Yunita, E., Falah, S., & Latifah, M. (2023). Analisis konsep pemimpin ideal dalam perspektif Imam Al-Ghazali (At-Tibru Masbuk fi Nashihati Al-Muluk). *Al-Munadzomah*, 2(2), 74-88. <https://doi.org/10.51192/almunadzomah.v2i1.584>
- Zaim, H., Demir, A., & Budur, T. (2021). Ethical leadership, effectiveness and team performance: An Islamic perspective. *Middle East Journal of Management*, 8(1), 42. <https://doi.org/10.1504/mejm.2021.111991>